

Awasi Tender Gedung DPR

JAKARTA—Proses lelang pembangunan gedung baru DPR akan segera berlangsung pada 14 Maret mendatang. Dalam proyek besar tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dilibatkan untuk mengawasi proses tender tersebut. Lembaga antikorupsi tersebut pun menyatakan siap melakukan pengawasan terhadap proyek yang sempat menuai kontroversi dari banyak pihak tersebut.

“KPK siap mengawasi jalannya proyek gedung baru DPR. Kita juga siap melakukan upaya pencegahan korupsi, sehingga jangan sampai terjadi korupsi dalam proyek tersebut. Karena proyek ini bernilai sangat besar,” papar Wakil Ketua KPK Haryono Umar ketika dihubungi koran ini, kemarin (12/3).

Haryono memaparkan, selain melakukan pengawasan, pihaknya akan memberikan penjelasan kepada para peserta tender. Para peserta tender nantinya diharapkan bisa memahami aturan pengadaan barang dan jasa yang termuat dalam Keppres No 80 Tahun 2003 serta sejumlah aturan yang lain. “Jadi ya kita ikut mencegah jangan sampai itu (korupsi) itu



Haryono Umar

terjadi. Soal pemberian penjelasan itu pernah kita lakukan kepada peserta tender waktu itu di Angkasa Pura,” katanya.

Terkait pengawasan tersebut, lembaga superbodi tersebut mengapresiasi langkah pihak DPR yang melibatkan KPK dalam proyek besar tersebut. Pimpinan bidang pencegahan tersebut menyatakan, pada awalnya, pihaknya pernah diminta memberikan masukan terkait proyek tersebut. Untuk itu, KPK menyatakan akan melakukan pengawasan secara maksimal.

Seperti diketahui, Setjen DPR menyatakan pihaknya akan memulai proses tender

prakualifikasi pembangunan gedung baru DPR pada 14 Maret silam, melalui pengumuman di media massa, internet dan papan pengumuman. Setelah proses tersebut, akan dilanjutkan dengan pembukaan dokumen penawaran sampel pertama pada 5 Mei secara terbuka dengan melibatkan KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pemenang lelang akan diumumkan pada 6 Juni mendatang.

Sejken DPR Nining Indra Saleh mengatakan, pihaknya berjanji akan melakukan proses pembangunan gedung secara transparan. Dia juga menyatakan akan memberikan keterangan kepada pers secara rutin terkait proyek tersebut. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan fisik gedung baru DPR menelan biaya hingga Rp 1,138 triliun. Namun, jumlah tersebut akan bertambah jika disertakan biaya konsultan. Sehingga total biaya pembangunan gedung baru mencapai Rp 1,164 triliun. *(ken/agnm)*